

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arifin P. Soeria Atmadja. 2014. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Bandung: Mujahid Press.
- Bagir Manan. 1998. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Bandung : Armico.
- Bahder Djohan Nasution, Dkk.. 2020. *Buku Panduan Penulisan Tesis*. Jambi : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Blau PM dan Marshall WM. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Hadiyanto. 2022. *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok : Rajawali Pers
- Hendra Karianga. 2022. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama Cetakan Ke-3. Jakarta : Kencana.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black'S Law Dictionary*. West Publishing.
- Joko Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Kevin D. Zega. 2020. *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian / Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Martin Albrow. 2007. *Birokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2014. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*. Depok : Rajawali Pers.

- Prabawa Utama. 1991. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Ind-Hill.Co
- Ridwan HR.. 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : Remaja Rosdakarya Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama.
- Tjokroamidjojo B.. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : Pendidikan Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana.
- Tri Yuniningsih. 2019. *Kajian Birokrasi*. Semarang : Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP.
- W. Riawan Tjandra. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal/Makalah/Artikel :

- Abdul Hamid Tome. 2012. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Unsrat*. Volume XX Nomor 3.
- Ali Tafriji Biswan dan Iklima Devi Grafitanti. 2021. Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Volume 2 Nomor 1. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Aries Djaenuri dan Enceng. Sistem Pemerintahan Daerah. *Modul*. Tidak Diterbitkan. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Dian Puji N. Simatupang. 2011. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah. *Makalah*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ditjen Bina Keuangan Daerah. Paparan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Pada Rapat Koordinasi Data Bidang Keuangan Daerah Secara Nasional Tentang Tentang Persiapan Infrastruktur & SDM Dalam Implementasi E-Budgeting. *Presentasi*. Tidak Diterbitkan. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.

Eko Slamet Riyanto. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka Di Badan Informasi Publik Kemkominfo. *Tesis*. Tidak Diterbitkan. Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana. Jakarta : Universitas Indonesia

Fajri Ramadhan dan Purwatiningsih. 2016. Penerapan E-Budgeting Sebagai Wujud Penerapan *Good Public Governance* : Studi Kasus Provinsi Jakarta”. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta : Universitas Indonesia.

Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin dan Abdul Wachid. 2014. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 2 Nomor 2. Malang : Universitas Brawijaya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2013. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Artikel*. Jakarta : Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. 2016. Laporan Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi. *Makalah*. Tidak Diterbitkan. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang. *Yuridika*. Volume 7. Nomor 5 & 6. Surabaya : Universitas Airlangga.

Riyadi. Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Perilaku Administrasi. *Artikel*. Tidak Diterbitkan. Bandung : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung.

Sastri Yunizarti Bakry. Paparan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Pada Rapat Koordinasi Data Bidang Keuangan Daerah Secara Nasional Tentang Tentang Persiapan Infrastruktur & SDM Dalam Implementasi E-Budgeting. *Presentasi*. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.

Sumule Tumbo. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. *Presentasi*. Tidak Diterbitkan. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 2019. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Makalah*. Surabaya : BPK Provinsi Jawa Timur.

Wahyuningsih. 2020. Evaluasi *E-budgeting* Di Pemerintah Kota Surakarta (Tahun Anggaran 2018). *Ejournal Universitas Diponegoro*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Website :

Arum Sutrisni Putri. 2019. Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. *Artikel*. Diakses melalui www.kompas.com (diakses pada 20 Agustus 2023).

Balqis Falahnda. 2021. Apa yang Dimaksud dengan E-Budgeting. *Artikel*. Diakses melalui <https://tirto.id> (diakses pada 20 Agustus 2023).

Ady Thea DA. 3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/> (diakses pada 25 Agustus 2023).

Badan Pengawas Keuangan. Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. *Artikel*. diakses melalui <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan> (diakses pada 25 Agustus 2023).

Chiara Anindya Samue, “Capaian, Peluang, dan Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia, *Makalah*. Diakses melalui <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/15-CfDS-Case-Study-Capaian-Peluang-dan-Tantangan-Implementasi-e-Government-di-Indonesia.pdf> (diakses pada 25 Agustus 2023).

Pemerintah Kota Surabaya. 2017. E-Government. *Presentasi*. Diakses melalui <https://djp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/05/e-Planing-Budgeting-2017.pdf> (diakses pada 20 Agustus 2023).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2016. United Nations E-Government Knowlegdebase. Diakses melalui <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia> (diakses pada 25 Agustus 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional